



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
06 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya realokasi rincian dari Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Barat ke Provinsi Kalimantan Utara, perlu melakukan perubahan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
 WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	2.040.594.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.412.661.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	627.933.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2.358.086.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.428.420.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	929.666.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2.400.169.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.885.714.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	514.455.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2.097.917.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.527.831.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	570.086.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1.724.240.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.166.143.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	558.097.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1.674.782.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.216.806.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	457.976.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
7	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.712.270.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.179.661.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	532.609.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	2.263.963.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.685.663.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	578.300.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2.190.943.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.490.757.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	700.186.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2.239.031.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.742.059.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	496.972.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	723.739.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	366.921.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	356.818.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1.563.100.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.136.940.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	426.160.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2.848.986.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.985.816.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	863.170.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2.394.816.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.887.038.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	507.778.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.234.510.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.642.435.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	592.075.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	3.226.289.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.242.058.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	984.231.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
17	GUBERNUR BALI	BALI	2.327.525.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.712.402.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	615.123.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	2.603.191.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.747.942.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	855.249.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	2.012.399.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.311.207.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	701.192.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	2.161.161.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.603.705.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	557.456.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1.842.154.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.307.277.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	534.877.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1.977.445.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.437.131.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	540.314.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1.822.289.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.237.883.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	584.406.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	1.958.498.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.352.881.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	605.617.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1.834.722.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.311.968.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	522.754.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1.844.539.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.266.889.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	577.650.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	2.789.163.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.156.391.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	632.772.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1.918.832.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.382.613.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	536.219.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	3.141.181.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.007.925.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.133.256.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
		5 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	2.322.723.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.819.704.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	503.019.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2.189.412.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.392.005.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	797.407.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1.971.971.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.431.052.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	540.919.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2.449.132.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.728.376.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	720.756.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2.410.228.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.795.726.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA, EDUKASI ACI	
		5 PENYELENGGARAAN AKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	614.502.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR DAERAH	
		3 MELAKUKAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PELATIHAN EKSPOR	
		4 MEMFASILITASI UKM DALAM PARTISPASI PAMERAN DALAM NEGERI	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI